

**EVALUASI PROGRAM USAHA EKONOMI KELURAHAN SIMPAN PINJAM
(UEK-SP) PERDANA MANDIRI SEJAHTERA KELURAHAN SUNGAI PAKNING
KECAMATAN BUKIT BATU KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2012-2014**

By: M. Ryan Kurniawan
ryankurniawan@yahoo.com
Supervisor: Dr. Febri Yuliani, S.Sos, M.Si
Library of Riau University

Department of Public Administration
Faculty of Social Science and Political Science
University of Riau

Campus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km 12.5 Simp. New Pekanbaru
Phone Fax 0761-63277

ABSTRACT

The research present describe subdistrict saving loan economic program in Sungai Pakning Subdistrict Bukit Batu District Bengkalis Regency. Subdistrict saving loan economic program are one of empowerment program in Indonesia that have purpose to decrease a poverty in Indonesia. Sungai Pakning Subdistrict are one of region in Bengkalis Regency that has done a subdistrict saving loan economic program since 2012. But untill now implementation of this program are not optimally and influence by some factors

The research use the methode are qualitative methodes that analyze problem research by describe the subject and object conditions based on real fact. This research use location in Sungai Pakning Subdistrict Bukit Batu District Bengkalis Regency and researcher collect data from books, government regulation, jurnal, mass media, website and deep interview with informan likes Head of Subdistrict, head of Coperation Perdana Mandiri Sejahtera, and the user of program.

The conclusion of this research are evaluation of subdistrict saving loan economic program in Sungai Pakning Subdistrict Bukit Batu District Bengkalis Regency has done by some indicators are purpose of program, efectivity of program, finance efectivity of program, and distribution of finance program. Some factors that influence the subdistrict saving loan economic program in Sungai Pakning Subdistrict Bukit Batu District Bengkalis Regency are quality of human resources in subdistrict saving loan economic program in Sungai Pakning Subdistrict, minims of participation from the purpose of the program.

Keywords: evaluation, programm and UEK SP.

PENDAHULUAN

Kemiskinan bukan hanya permasalahan ekonomi semata, tetapi merupakan hasil akhir interelasi faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Disamping problem klasik mengenai kekurangan kebutuhan dasar, dimensi kemiskinan juga mencakup problem ketidakberdayaan dan keterlibatan masyarakat luas dalam proses pengambilan keputusan, serta problem kerentanan dan kerawanan terhadap resiko-resiko diluar dirinya. (Rencana Strategis. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Bengkalis, 2014. Hlm 3). Sasaran kebijakan pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, yang berorientasi pada peningkatan pendapatan masyarakat terutama yang mempunyai keterbatasan ekonomi. Pemerintah Daerah bertekad untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia dengan berbagai cara penanggulangan kemiskinan sudah menjadi program vital pemerintah dalam menyusun dan melaksanakan rencana pembangunan. Hal ini dikarenakan kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia sebagai negara kesatuan. Salah satu Provinsi di Indonesia yang masih mengalami permasalahan dalam kemiskinan adalah Provinsi Riau.

Program dana UEK-SP di Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis merupakan hasil dana *sharing budget* antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. LKM UEK-SP sudah beroperasi sejak tahun 2007 yaitu LKM UEK-SP Perdana Mandiri Sejahtera. UEK-SP memiliki Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) yang merupakan dasar dan landasan operasional kegiatan pengelolaan. Pengelolaan dana usaha merupakan tanggung jawab pengelola dan pengurus UEK-SP serta perangkat Kelurahan yang ada dengan mengutamakan musyawarah Kelurahan dalam setiap keputusan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hakikat dari penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian ini yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati serta upaya untuk mencari pemecahan masalah dengan menggambarkan peristiwa-peristiwa berdasarkan fakta atau bukti yang ada. Jenis penelitian adalah deskriptif yang selaras dengan pendapat Sugiyono (2005), yaitu penelitian yang mengungkapkan atau memotret situasi sosial secara menyeluruh, luas dan mendalam.

Moleong (2002: 190), Penelitian kualitatif diartikan yaitu menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek atau objek peneliti (lembaga, masyarakat, daerah dan lain-lain), pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana mestinya. Sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*, yaitu dengan teknik menentukan informan berdasarkan karakteristik tertentu sesuai yang dikehendaki peneliti. Informan merupakan keseluruhan dari pada objek yang diteliti di mana karakteristiknya telah diketahui. Informan yang tentunya dapat memberikan data relevan berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

A. Wawancara

Menurut Arikunto (2006 : 227), bahwa teknik wawancara (*interview*) adalah suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner lisan yang diwujudkan dalam dialog antara peneliti dengan responden. Dari hasil tanya jawab tersebut, masalah-masalah atau data yang ditemukan dianalisis, dirumuskan dan selanjutnya dicarikan pemecahannya.

Kegiatan pengumpulan informasi yang dijalankan dengan menanyakan langsung kepada informan untuk

memperoleh data kualitatif dalam upaya memperoleh pemahaman secara komprehensif terhadap penelitian yang dilakukan. Tujuan penggunaan teknik wawancara ini merupakan konfirmasi informasi dari responden mengenai objek yang diteliti. Teknik wawancara ini dimaksudkan juga untuk melengkapi data dan informasi yang diperoleh melalui teknik-teknik lain, sehingga dapat melengkapi kekurangan data yang ingin diambil.

B. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sumber informasi berupa bahan – bahan tertulis atau tercatat berupa arsip-arsip ataupun dokumen-dokumen yang berakaitan dengan masalah yang diteliti. Arikunto (2006:231) menyatakan bahwa “dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya”.

Teknik analisis data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik analisis data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan seperti yang dikemukakan Arikunto (2006 : 308). Analisis data, menurut Potton dalam Moleong (2007:280), adalah proses mengatur urutan data, mengoordinasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Untuk melihat data-data yang bisa mempengaruhi dan berpengaruh terhadap objek yang diteliti, dengan langkah-langkah sebagaimana yang dikemukakan oleh Nasution (1998:129) :

1. Reduksi Data

Data yang didapat dari lapangan masih berupa uarain atau laporan yang terperinci yang akan terasa sulit bila tidak tereduksi, dirangkum hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang

penting dicari polanya. Jadi laporan lapangan sebagai bahan mentah disingkat, direduksi lebih sistematis sehingga lebih mudah dikendalikan.

2. *Display* (penyajian) data
Bagian-bagian tertentu pada penelitian dengan menggunakan tabel dan grafik penelitian.
3. Kesimpulan dan Verifikasi
Menarik hasil akhir dari penyajian data dan menguji kebenaran hasil kesimpulan dari penelitian.

Menurut **Subarsono (2005:119)**

Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja. Kebijakan harus diawasi dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut “evaluasi kebijakan”. Evaluasi biasanya ditujukan untuk memulai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara “harapan” dan “kenyataan”. Sedangkan menurut **Riant Nugroho (2003:183)**. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah yang telah terselesaikan, tetapi juga menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah.

Menurut **Budi Winarno**

(2002:165) Evaluasi merupakan tahap terakhir dalam proses kebijakan. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Seringkali terjadi, kebijakan publik yang gagal meraih maksud dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut **Dunn (2003:608)** evaluasi mengandung arti produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataan mempunyai nilai, hal ini berarti hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan dan sasaran. Selanjutnya Dunn

mengatakan diperlukan seperangkat prosedur yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang akan dievaluasi, yaitu dengan membuat daftar yang melingkupi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Input (masukan) adalah masukan yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan untuk itu dikembangkan instrumen yang meliputi indikator:
 - a. Sumberdaya pendukung (SDM, uang, sarana dan prasarana)
 - b. Bahan-bahan dasar pendukung (peralatan dan teknologi)
2. Proses adalah bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat untuk itu dikembangkan instrumen yang meliputi indikator:
 - a. Tepat sasaran atau tidak
 - b. Tepat guna atau tidak
 - c. Efisien atau tidak
3. Output (keluaran) merupakan hasil dari pelaksanaan kebijakan, apakah suatu pelaksanaan kebijakan menghasilkan produk sesuai tujuan yang ditetapkan dan yang menjadi indikatornya adalah:
 - a. Tepat atau tidak sasaran yang dituju
 - b. Berapa besaran tercover
 - c. Seberapa banyak sasaran yang tertangani
 - d. Seberapa besar kelompok sasaran yang terlibat
4. Sedangkan dampak adalah apakah suatu pelaksanaan kebijakan yang berdampak nyata terhadap kelompok sasaran dengan tujuan, untuk itu dikembangkan instrumen yang meliputi indikator :

- a. Ada tidaknya perubahan pada target/sasaran
- b. Seberapa besar perubahan kelompok sasaran
- c. Seberapa signifikan perubahan yang terjadi pada kelompok sasaran

Menurut **Dunn (2000:13)** fungsi dari evaluasi adalah sebagai:

1. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.
2. Evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.
3. Evaluasi memberikan sumbangan aplikasi metode-metode analisis kebijakan lain termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan.
4. Evaluasi dapat menyumbangkan pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau evisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan dan target perlu di definisikan ulang.

Senada dengan hal yang telah disebutkan diatas, **Moekijat (1995:180)** mengembangkan evaluasi dalam penggunaannya yang paling umum adalah suatu proses yang dilakukan untuk menentukan nilai (Value) dan menentukan bagaimana program-program ini sesungguhnya berjalan, untuk mengukur hasil dalam kondisi-kondisi pelaksanaan dan menyelidiki apakah program dilaksanakan sesuai dengan apa yang diinginkan dan apabila tidak, berada dalam posisi untuk menghentikan atau memperbaikinya. Selanjutnya **Thomas Dye dalam Wayne Parsons (2008:547)** mendefinisikan evaluasi kebijakan adalah

pemeriksaan yang objektif, sistematis, dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program Publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Evaluasi Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) di Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis

Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang simpan pinjam dan merupakan milik masyarakat kelurahan diusahakan serta dikelola oleh masyarakat kelurahan. Tujuan Pemerintah dalam membuat program ini adalah untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat untuk bisa hidup mandiri dengan mengembangkan usaha kecil dan merupakan sektor usaha strategis dan potensial dalam menyerap tenaga kerja baru.

Disamping itu, fakta menunjukkan kemampuan usaha kecil untuk bertahan dalam krisis ekonomi dan mampu memulihkan penurunan kondisi usaha dengan cepat. Dengan adanya keberpihakan Pemerintah terhadap usaha kecil diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan usaha kecil diharapkan dapat berkembang dan menjadi usaha kecil ini dapat berkembang dan menjadi usaha besar sehingga memberikan kontribusi yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi Nasional. Tujuan di bentuknya UEK-SP adalah untuk:

1. Mendorong kegiatan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan.
2. Meningkatkan dorongan berusaha bagi anggota masyarakat Desa/Kelurahan yang berpenghasilan rendah.

3. Mendorong sektor usaha informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat Desa/Kelurahan.
4. Menghindarkan masyarakat dari praktik ijon.
5. Meningkatkan peranan masyarakat dalam pengelolaan Dana Usaha Desa/Kelurahan.
6. Meningkatkan kebiasaan gotong royong dan gemar menabung secara tertib.
7. Meningkatkan peran perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Desa/Kelurahan.
8. Memenuhi kebutuhan sarana /prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa/Kelurahan (BPPM,2005: 1)

Pengelolaan UEK ini perlu diadakan pembinaan dan pengendalian supaya dana usaha Desa sebagai aset bagi masyarakat Desa dapat terus dikembangkan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan, serta untuk memantau dan mengendalikan agar pelaksanaannya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dan mekanisme yang telah dimanfaatkan. Dana Usaha Kelurahan tersebut akan dijadikan modal kerja bagi UEK, yang akan disalurkan secara bergulir kepada masyarakat miskin dalam rangka bantuan permodalan dalam kegiatan ekonomi produktifnya. Penyaluran ini dilakukan dengan cara pemberian kredit atau pinjaman yang harus dikembalikan melalui pengelola UEK dengan tingkat suku bunga tertentu dengan jangka waktu tertentu. Mekanisme penyaluran dana Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. Calon pemanfaat mengajukan proposal rencana usaha pemanfaat (RUP)
2. Pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi rencana usulan pemanfaat (RUP) oleh staf analisis kredit

3. Pemberian hasil verifikasi oleh staf analisis kredit kepada otoritas, pengawas, KPM, pengelola dan Pendamping (PD)
4. Rapat khusus rekomendasi akhir oleh otoritas, pengawas, KPM Pengelola dan PD
5. Pemberian umpan balik kepada calon pemanfaat
6. Selanjutnya dibawa ke Musyawarah Kelurahan (MK) Perguliran

Ada 3 tahap yang dilakukan dalam pemberian kredit pada program UEK-SP di Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis yaitu :

1. Tahap Permohonan Kredit

Pada tahap ini calon peminjam atau pemanfaat mengajukan permohonan kredit, pada umumnya berupa pengisian form permohonan yang telah disediakan oleh UEK-SP.

2. Tahap Penilaian Kredit

Berdasarkan permohonan kredit yang diterima, maka pihak UEK-SP melakukan penilaian atau evaluasi terhadap kelayakan kredit yang didasarkan atas penilaian kelayakan usaha dari calon penerima atau pemanfaat kredit biasanya ada 5 tahapan verifikasi :

- a. Pembahasan awal proposal atau permohonan kredit
- b. Kunjungan lapangan (OTS)
- c. Umpam balik
- d. Pembahasan akhir
- e. Rekomendasi

3. Tahap Pemutusan dan Realisasi Kredit

Dari penilaian tersebut, maka lembaga perkreditan dalam hal ini UEK-SP di Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis dapat mengambil keputusan dicairkan, ditunda, atau ditolak. Keberhasilan UEK-SP di ditentukan dengan cara memberi skors/nilai yang dicapai oleh masing-masing UEK-SP.

3.1.1 Ketepatan Sasaran Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam di Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis

Kelurahan Sungai Pakning merupakan Kelurahan yang berada di Kecamatan Bukit Batu, dengan jumlah penduduk 4.003 jiwa dan dengan jumlah KK sebanyak 1.265 KK serta memiliki luas wilayah \pm 2,5 km. Adapun mata pencaharian (usaha) masyarakat di Kelurahan Sungai Pakning adalah perkebunan sawit, karet, perternakan, nelayan, rumah makan dan kedai harian. Salah satu wadah dalam peningkatan ekonomi masyarakat di Kecamatan Bukit Batu terutama di Kelurahan Sungai Pakning adalah peningkatan usaha masyarakat dengan mekanisme sistem koperasi yang tentu saja dikelola oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungai Pakning. Menurut Acil Esyno, S.STP M.Si, selaku Lurah Sungai Pakning, bahwa:

“Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) dalam bentuk dana bergulir sudah berjalan sebagaimana yang diinginkan oleh Pemerintah, namun saya menyarankan untuk lebih meningkatkan kompetensi pengurus UEK-SP untuk lebih pro aktif dalam menganalisa kebutuhan masyarakat”.(Hasil wawancara penulis dengan Acil Esyno, S.STP M.Si, selaku Lurah Sungai Pakning pada tanggal 21 Juli 2016) Akan tetapi, dalam pelaksanaan program usaha ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam di Kelurahan Sungai Pakning mengalami beberapa permasalahan yang signifikan dan cukup penting. Salah satu permasalahannya adalah berupa tingginya tunggakan yang berada di Kelurahan Sungai Pakning menjadikan UEK-SP di Kelurahan tersebut tidak sehat sehingga dalam hal melakukan proses simpan pinjam selalu mengalami kendala, adapun beberapa kendala yang terjadi diantaranya:

- a. Tidak adanya uang yang akan dipinjamkan karena kredit macet
- b. Tidak adanya penambahan modal
- c. Daftar tunggu pinjaman yang panjang
- d. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengangsur pijsaman

Sejak tahun 2012, Kelurahan Sungai Pakning telah mendapat subsidi modal awal dari APBD Provinsi, dalam perjalannya UEK-SP ini termasuk kedalam kategori tidak sehat dengan kata lain memiliki tunggakan cukup tinggi, dengan jumlah pemanfaat 149 orang dan dana yang bergulir Rp. 2.167.000.000,- dengan jumlah tunggakan Rp. 20.036.033,- lebih tinggi dari UEK-SP lainnya yang berada di Kecamatan Bukit Batu. Dalam pelaksanaan program usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam di Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis maka menurut Tri Buana selaku Ketua Program UEK SP Perdana Mandiri Sejahtera, bahwa:

Program UEK SP di Kelurahan Sungai Pakning telah dimulai sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, jumlah pemanfaat program usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam di Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis sebanyak 149 peminjam atau pemanfaat program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam. (Hasil wawancara penulis dengan Tri Buana selaku Ketua Program UEK SP Perdana Mandiri Sejahtera pada tanggal 22 Juli 2016). Sejak awal pelaksanaan sampai dengan saat ini awalnya program usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam di Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis diminati dan banyak warga yang antusias. Berikut ini merupakan rincian penggunaan pinjaman dana dari usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam di Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1 Penggunaan Dana Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam di Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis

| N O | Jenis Usaha | Peman faat Dana | Jumlah (Rp) |
|----------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1 | Perdagangan | 109 | Rp.1.571.000.000 |
| 2 | Pertanian | 1 | Rp.5.000.000 |
| 3 | Perkebunan | 12 | Rp.153.000.000 |
| 4 | Perikanan | 0 | - |
| 5 | Peternakan | 5 | Rp.21.000.000 |
| 6 | Industri kecil | 3 | Rp.55.000.000 |
| 7 | Jasa | 19 | Rp.302.000.000 |
| Jumlah | | 149 | Rp.2.167.000.000 |

Sumber: Laporan Program UEK SP di Kelurahan Sungai Pakning

Berdasarkan data tersebut maka dapat dijelaskan bahwa program usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam di Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis diberikan kepada 109 orang pengguna pada tahun 2012, pada tahun 2013 kepada 258 pemanfaat dana dan pada tahun 2014 kepada 462 pemanfaat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam di Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis dilakukan dominasi oleh

masyarakat jenis kelamin laki-laki. Padahal dalam peraturan usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam di Kelurahan Sungai Pakning, maka program usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam di Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis seharusnya diutamakan untuk masyarakat jenis kelamin perempuan.

Kendala utama dalam program dana bergulir UEK-SP program usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam di Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis adalah lemahnya kemampuan masyarakat menengah kebawah dalam pengembalian dana UEK-SP. Hal ini disebabkan karena mayoritas pemanfaat adalah dari kelompok Rumah Tangga Miskin (RTM) dimana sasaran program PPD adalah diperuntukan untuk kelompok marginal atau masyarakat ekonomi lemah sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Lurah Sungai Pakning, Acyl Esyno, SSTP M.Si bahwa:

“Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) mengalami permasalahan diumpamakan seperti pisau bermata dua dimana di satu sisi sesuai dengan sasaran program yaitu pro masyarakat miskin namun disisi lain mengalami kendala dikarenakan masyarakat miskin tidak mampu membayar cicilan sebagai mana yang telah ditetapkan pada saat menandatangani perjanjian kredit, hal ini menjadi polemik yang tidak bisa diselesaikan sehingga dana tidak kembali ke postnya (UEK-SP) sehingga menimbulkan tidak tersediannya dana segar yang digulirkan serta semakin panjangnya daftar tunggu calon pemanfaat UEK-SP berikutnya”(Hasil wawancara penulis dengan Lurah Sungai Pakning, Acyl Esyno, SSTP M.Si pada tanggal 12 Juli 2016).

3.1.2 Efisiensi Penggunaan Anggaran Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam di Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis

Keberhasilan suatu program sangat dipengaruhi oleh teknis pelaksanaan yang sudah diatur sedemikian rupa sebelum program tersebut berjalan, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa tidak adanya payung hukum yang menjadi acuan baku program UEK-SP ini menjadi penyebab utama kegagalan dari sisi teknis pelaksanaan program. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyambut baik program ini dengan menyikapi melalui pembentukan Peraturan Bupati yang memuat secara jelas aturan-aturan pelaksanaan program usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam di Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. Sekaligus adanya reward dan punishment serta penentuan honorarium/insentif pengelola yang memadai dan sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR).

Sesuai dengan pernyataan dari Lurah Sungai Pakning, Acyl Esyno, SSTP M.Si, bahwa: “Pada dasarnya program UEK-SP sudah sangat bagus, mungkin terkait dengan peraturan pelaksanaan program agar dapat di sempurnakan lagi terutama aturan hukum tentang UEK-SP”(Hasil wawancara penulis dengan Lurah Sungai Pakning, Acyl Esyno, SSTP M.Si pada tanggal 21 Juli 2016).

Dari wawancara diatas terlihat bahwa pihak Pemerintah Kabupaten Bengkalis selaku instansi pembina dan pengawas seluruh UEK-SP di Kota Bengkalis mempunyai suatu kebijakan untuk menjadikan UEK-SP sebagai suatu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang mempunyai legalitas badan hukum yang jelas sebagaimana yang diinginkan UU LKM Nomor 1 Tahun 2013 tersebut. Diharapkan nantinya terbentuk suatu Peraturan Bupati yang memuat ketentuan, kewenangan, dan tugas pokok fungsi dari setiap sisi baik itu pengelola atau pun pemanfaat program usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam di Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. Tentu saja hal ini akan memberikan kontribusi positif

terhadap keberhasilan Program UEK-SP dimasa mendatang. Sejauh ini untuk proses monitoring evaluasi oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis secara rutin melakukan rapat koordinasi dan audit internal UEK-SP dan mewajibkan adanya Musyawarah Kelurahan Pertanggungjawaban Tahunan (MKPT), di samping itu tetap menempatkan satu orang pendamping disetiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis termasuk juga dalam program usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam di Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. Adapun tugas pokok pendamping adalah mengawasi pengelola dalam menjalankan program UEK-SP, melakukan monitoring dan audit internal keuangan, melakukan pengecekan data verifikasi yang telah dilakukan oleh pengelola, ikut membantu menyelesaikan masalah baik internal maupun eksternal.

3.1.3 Efektifitas Penggunaan Anggaran Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam di Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis

Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Ketidakmampuan pelaksana program ini disebabkan karena kebijakan pemungutan pajak alat berat merupakan hal yang baru bagi wajib pajak dimana dalam melaksanakan program ini membutuhkan kemauan dan pemahaman yang khusus.

Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana

harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Kenyataan dilapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para pelaksana dilapangan. Kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggung jawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan inefisien. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada.

Sumber daya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan. Oleh karena itu, faktor lainnya yang berpengaruh terhadap tingginya tunggakan dalam program program usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam di Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis adalah banyaknya dana pinjaman program usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam di Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis yang belum tepat sasaran. Seharusnya program program usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam di Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis ini diterima oleh kelompok masyarakat miskin dan bertujuan untuk menciptakan peningkatakan taraf kehidupan masyarakat, akan tetapi banyak penerima program UEK-SP di Kelurahan Sungai Pakning yang berasal dari keluarga yang cukup sejahtera.

Berdasarkan wawancara penulis dengan pengelola program UEK-SP di Kelurahan Sungai Pakning, bahwa: Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) adalah untuk memberikan bantuan tambahan modal kepada masyarakat yang telah mempunyai usaha kecil, sehingga masyarakat dapat mengembangkan usahanya, meningkatkan pendapatannya dan mampu menciptakan lapangan kerja yang baru. Namun pada kenyatannya kebanyakan masyarakat meminjam dana UEK-SP bukan untuk modal usaha hanya sebagian masyarakat saja yang benar-benar meminjam dana UEK-SP untuk menambah modal usaha mereka. Sebagian besar masyarakat menggunakan bantuan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli kendaraan bermotor, membayar hutang, dan kebanyakan masyarakat juga menggunakan dana bantuan tersebut untuk menambah modal dagangannya. (Hasil wawancara penulis dengan Rini Purnama Ningrum selaku Kasir Program UEK-SP di Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis pada tanggal 21 Juli 2016).

Mayoritas masyarakat pengguna program usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam di Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis adalah berasal dari suku Melayu dan bergerak dalam kegiatan usaha dagang. Program usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam di Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu juga didominasi oleh kelompok ibu-ibu rumah tangga. Sehingga hal ini terkesan tidak tepat sasaran dalam pelaksanaan program usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam di Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. Sehingga permasalahan tidak tepat sasaran dari program usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam di Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten

Bengkalis mengakibatkan tingginya tunggakan dari dana cicilan kredit program usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam di Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis.

3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Evaluasi Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam di Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis

Salah satu Tujuan program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) adalah untuk memberikan bantuan tambahan modal kepada masyarakat yang telah mempunyai usaha kecil, sehingga masyarakat dapat mengembangkan usahanya, meningkatkan pendapatannya dan mampu menciptakan lapangan kerja yang baru. Namun pada kenyatannya kebanyakan masyarakat meminjam dana UEK-SP bukan untuk modal usaha hanya sebagian masyarakat saja yang benar-benar meminjam dana UEK-SP untuk menambah modal usaha mereka. Berdasarkan hasil wawancara dan analisa data dengan key informan dan informan pada penelitian ini, maka dapat dipaparkan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya tunggakan program usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam di Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis sebagai berikut :

3.2.1 Rendahnya Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Program UEK-SP di Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis

Implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan

suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarluaskannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan.

Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implemetor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan. Sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Ketidakmampuan pelaksana program ini disebabkan karena kebijakan pemungutan pajak alat berat merupakan hal yang baru bagi wajib pajak dimana dalam melaksanakan program ini membutuhkan kemauan dan pemahaman yang khusus.

Perkembangan dana program usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam di Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis meningkat tajam, dari Rp 16,5 Miliar meningkat menjadi Rp 92,98 Miliar dengan jumlah pemanfaat sebanyak 10.332 orang. Program UEK-SP merupakan

budget sharing antara Pemerintah Propinsi Riau dengan Pemerintah Kota Bengkalis dengan cara menyalurkan dana bergulir Rp 500 juta ke Kelurahan di Kabupaten Bengkalis. Sejak tahun 2012, Kelurahan Sungai Pakning telah mendapat subsidi modal awal dari APBD Provinsi, dalam perjalannya UEK-SP ini termasuk kedalam kategori tidak sehat dengan kata lain memiliki tunggakan cukup tinggi, dengan jumlah pemanfaat kumulatif sebanyak 462 pemanfaat dan yang masih aktif hingga saat ini sebanyak 274 pemanfaat UEK-SP serta dana yang bergulir Rp. 2.167.000.000,- dengan jumlah tunggakan Rp. 118.182.033,- lebih tinggi dari UEK-SP lainnya yang berada di Kecamatan Bukit Batu.

Berdasarkan wawancara penulis dengan pengelola program UEK-SP di Kelurahan Sungai pakning, bahwa: program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) adalah untuk memberikan bantuan tambahan modal kepada masyarakat yang telah mempunyai usaha kecil, sehingga masyarakat dapat mengembangkan usahanya, meningkatkan pendapatannya dan mampu menciptakan lapangan kerja yang baru. Namun pada kenyatannya kebanyakan masyarakat meminjam dana UEK-SP bukan untuk modal usaha hanya sebagian masyarakat saja yang benar-benar meminjam dana UEK-SP untuk menambah modal usaha mereka. Sebagian besar masyarakat menggunakan bantuan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli kendaraan bermotor, membayar hutang, dan kebanyakan masyarakat juga menggunakan dana bantuan tersebut untuk menambah modal dagangannya. (Hasil wawancara penulis dengan Irwan selaku Ketua Program UEK-SP di Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis pada tanggal 21 Juli 2016).

Mayoritas masyarakat pengguna program usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam di Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu

Kabupaten Bengkalis adalah berasal dari suku Melayu dan bergerak dalam kegiatan usaha dagang. Program UEK-SP yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Pelingtung Kecamatan Bukit Batu juga didominasi oleh kelompok ibu-ibu rumah tangga. Sehingga hal ini terkesan tidak tepat sasaran dalam pelaksanaan program program usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam di Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. Sehingga permasalahan tidak tepat sasaran dari program usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam di Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis mengakibatkan tingginya tunggakan dari dana cicilan kredit program usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam di Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis.

Oleh karena itu, diperlukan adanya koordinasi dan pengawasan yang tegas terutama dalam pendataan terhadap masyarakat pemanfaat pengguna program usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam di Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. Selain itu pengawasan terhadap masyarakat pemanfaat program UEK-SP di Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis juga sangat diperlukan untuk menghindari adanya besaran tunggakan cicilan dari masyarakat pengguna program UEK-SP. Selain itu, dari sisi pengelola UEK-SP motivasi juga sangat berpengaruh terhadap efektifitas kinerja pengelola UEK-SP. Tiap manusia memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Didalam kepengurusan UEK-SP terdiri dari beberapa unsur antara lain ketua, kasir, TU, SAK, dan beberapa anggota lainnya yang harus memiliki motivasi yang samauntuk keberhasilan program UEK-SP. kemudian harus mampu menjalin kerjasama tim yang baik dan solid.

3.2.2 Rendahnya Pemahaman Masyarakat tentang Program UEK-SP di Kelurahan Sungai Pakning

Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi program pemberdayaan masyarakat adalah sikap pelaksana program. Jika masyarakat setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui program usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam di Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis selain dari pemerintah juga harus didukung oleh masyarakat pengguna program UEK-SP. Oleh karena itu dalam program pemberdayaan masyarakat melalui program usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam di Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis banyak masyarakat yang tidak membayar tunggakan cicilan kredit dari porgram UEK-SP.

Fenomena program pemberdayaan masyarakat melalui program usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam di Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis ini akhirnya mengakibatkan program pemberdayaan masyarakat melalui program UEK-SP di Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis tidak berjalan secara optimal dan banyak masyarakat pengguna yang enggan untuk bertanggung jawab. Kondisi sumber daya manusia yang baik haruslah didukung dengan adanya motivasi dan prilaku yang baik pula sehingga menjadi suatu kekuatan dalam kelancaran pelaksanaan program usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam di Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. Program usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam di Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis dengan

kondisi Sumber daya manusia (pemanfaat) yang cukup baik ternyata tidak memberikan kontribusi positif terhadap kelancaran pembayaran cicilan kredit, dengan kata lain para pemanfaat memahami tentang syarat dan aturan-aturan dalam perjanjian kredit namun tetap diabaikan karena mempunyai motivasi dan prilaku negatif serta didukung pula dengan status ekonomi yang kurang baik. Hal ini sesuai dengan pernyataan Lurah Sungai Pakning, bahwa:

“Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) dalam bentuk dana bergulir sudah berjalan sebagaimana yang diinginkan oleh Pemerintah, namun saya menyarankan untuk lebih meningkatkan kompetensi pengurus UEK-SP untuk lebih pro aktif dalam menganalisa kebutuhan masyarakat”.(Hasil wawancara penulis dengan Lurah Sungai Pakning Acyl Esini SSTP M.Si pada tanggal 21 Juli 2016) Seiring dengan pernyataan Ketua program usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam di Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis, bahwa Saya mengharapkan Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk dapat lebih meningkatkan sosialisasi Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) kepada para pemanfaat khususnya masyarakat Sungai Pakning sehingga tidak memiliki persepsi yang salah tentang penggunaan dana bergulir ini. Selanjutnya para pendamping meningkatkan pengawasan serta monitoring evaluasi bilamana dana sudah dicairkan kepada masyarakat (pemanfaat)”.(Hasil wawancara penulis dengan Ketua Program program usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam di Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis pada tanggal 21 Juli 2016).

3.2.3 Penyaluran Dana UEK SP di Kelurahan Sungai Pakning yang Tidak Tepat Sasaran

Faktor lainnya yang berpengaruh terhadap tingginya tunggakan dalam

program usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam di Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis adalah banyaknya dana pinjaman program usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam di Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis yang belum tepat sasaran. Seharusnya program UEK-SP ini diterima oleh kelompok masyarakat miskin dan bertujuan untuk menciptakan peningkatakan taraf kehidupan masyarakat, akan tetapi banyak penerima program UEK-SP di Kelurahan Sungai Pakning yang berasal dari keluarga yang cukup sejahtera. Menurut Ketua program usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam di Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis, bahwa :

“Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) di Kelurahan Sungai Pakning memang mengalami beberapa permasalahan terutama terkait permasalahan tingginya tunggakan. Dalam pengamatan saya hal ini diakibatkan penyaluran program UEK SP di Kelurahan Sungai Pakning terkadang sulit untuk mendata warga yang memang membutuhkan dikarenakan sebagian besar warga yang mengurus proposal sebagai pemanfaat program ini secara hukum layak untuk menerima dikarenakan syaratnya yang cukup, akan tetapi dalam pelaksanaan teknis dilapangan terdapat masyarakat dari kelompok yang sejahtera mendapatkan program inilah yang sering menjadi permasalahan.”.(Hasil wawancara penulis dengan Ketua Program program usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam di Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis pada tanggal 21 Juli 2016).

Oleh karena itu, seharusnya dengan tingginya alokasi anggaran yang diperuntukkan kepada masyarakat pengelola program usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam di Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis ini tentu saja

berdampak pada pemberdayaan masyarakat yang lebih baik terutama dalam peningkatan taraf hidup masyarakat di Kelurahan Sungai Pakning.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya tentang evaluasi pelaksanaan program usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam di Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis, maka didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Evaluasi program usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam di Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis dilakukan dengan melihat ketepatan sasaran dari program UEK SP, Efektifitas penggunaan anggaran program UEK-SP di Kelurahan Sungai Pakning, Efisiensi penggunaan anggaran serta kecukupan penggunaan anggaran dan pemanfaatan anggaran kepada masyarakat miskin di Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi evaluasi program usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam di Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:
 - a. Rendahnya sumber daya manusia dalam pengelolaan program usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam di Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis.
 - b. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang penggunaan program usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam di Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis.
 - c. Penyaluran dana program UEK SP di Kelurahan

Sungai Pakning tidak tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Adi, Isbandi Rukminto, 2008, *Intervensi Komunitas : Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Press.

Anwar. 2007. *Menejemen Pemberdayaan Perempuan. Perubahan Sosial Melalui Pembelajaran Vocational Skill*. Alfabeta. Bandung.

AG, Subarsono,2010. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Dunn N, William. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

_____. 2008. *Public Policy Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan, Perumusan,Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Management dalam Kebijakan Publik, Kebijakan sebagai The Fifth Estate-Metode Penelitian Kebijakan* (edisi revisi). Jakarta: Gramedia.

Ekowati, Mas Roro Lilik. 2005. *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program*, Edisi Revisi. Bandung: PT Rosdakarya

Hasibuan, Malayu SP. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.

Nawawi, Islami. 2009. *Publik Policy Analisis, strategi, AdvokasiTeoridanPraktek*. Surabaya: Putra Mesdia Nusantara.

Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan*

Evaluasi. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.

_____. 2005. *analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Publik.* Bandung : Alfabeta

Rusli, Zaili, 2014. *Pemerksaan Masyarakat : Konsep, Kebijakan, dan Implementasi,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Soedjatmoko. 1995. *Dimensi Manusia Dalam Pembangunan.* PT. Pustaka LP3ES. Jakarta.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi.* Bandung: Alfabeta

Suharto, Edi. 2003. *Metode Penelitian Administrasi,* Bandung: Alfabeta

Suharto, Ph.D. Edi., 2006, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat,* Bandung : PT.Refika Aditama.

Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan: Teori dan Proses.* Yogyakarta: Media Pressindo.